

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
TENTANG KOTA LAYAK ANAK
TERHADAP ABH (ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM)
BERKAITAN MENGENAI ISU PEMENUHAN HAK ANAK**

TESIS

**Disusun untuk memenuhi Persyaratan
Memperoleh Derajat Magister Pada Program Studi Ilmu Hukum**

Minat Utama : Hukum dan Kebijakan Publik



Disusun oleh :

YOEL SIMANJUNTAK

NIM : S.310508221

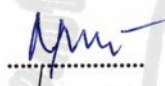

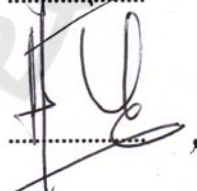
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2016**

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
TENTANG KOTA LAYAK ANAK
TERHADAP ABH (ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM)
BERKAITAN MENGENAI ISU PEMENUHAN HAK ANAK**

Disusun oleh :
YOEL SIMANJUNTAK
NIM : S.310508221

Telah Disetujui Oleh Tim Penguji

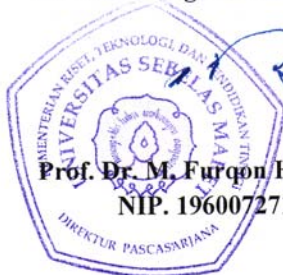
Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal

	Dr. Agus Riwanto, SAg.,SH.,MAg., NIP. 19730804200011001		20/17 /1
	Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., M.H NIP. 196302091988031003		20/17 /1
	Dr. Hari Purwadi, SH., Mhum NIP. 196412012005011001		20/17 /1

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd
NIP. 19600727197021001

Dr. Hari Purwadi, SH., Mhum
NIP. 196412012005011001

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
TENTANG KOTA LAYAK ANAK
TERHADAP ABH (ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM)
BERKAITAN MENGENAI ISU PEMENUHAN HAK ANAK**

Disusun oleh :

JOEL SIMANJUNTAK

NIM : S.310508221

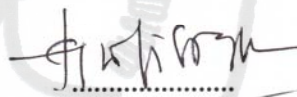
Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Nama

TandaTangan

Tanggal

1. Prof. Dr. Adi Sulistiyono, SH., M.H
NIP. 196302091988031003



20/17
/4
.....

Mengetahui :

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hari Purwadi, SH., MHum

NIP. 196412012005011001

TER

PERNYATAAN**NAMA : YOEL ANDAR SIMANJUNTAK****NIM : S.310508221**

Menyatakan dengan Sesungguhnya Bahwa Tesis yang berjudul “**EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TENTANG KOTA LAYAK ANAK TERHADAP ABH (ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM) BERKAITAN MENGENAI ISU PEMENUHAN HAK ANAK**”, adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut. Selanjutnya untuk menunjukkan Keaslian tesis saya, dengan ini saya bersedia di-*upload* atau dipublikasi *website* Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Surakarta, 07 November 2016

Yang membuat pernyataan,

YOEL ANDAR SIMANJUNTAK

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karuniaNya sehingga tesis yang berjudul **”EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TENTANG KOTA LAYAK ANAK TERHADAP ABH (ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM) BERKAITAN MENGENAI ISU PEMENUHAN HAK ANAK”** ini dapat peneliti selesaikan guna memenuhi persyaratan mencapai derajat Magister Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam kesempatan ini peneliti juga bermaksud menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga tesis ini dapat terselesaikan terutama kepada :

1. Prof. Dr. Ravik kasidi, M.S., selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Prof. Dr. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Prof. Dr. Supanto, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Dr. Hari Purwadi , SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
5. Prof. Dr. Adi Sulitiyono, SH., M.H., selaku Pembimbing I tesis yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi kesempurnaan penulisan tesis ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta atas segala dedikasinya yang telah memberikan ilmunya dengan penuh keihlasan.
7. Kepada Bapak Walikota Surakarta dan Wakil Walikota Surakarta yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil.
8. Keluarga tercinta yang telah memberikan dan mencurahkan kasih sayang, doa serta segenap perhatian, dukungan dan kepercayaan.
9. Teman-teman seperjuangan, semoga persahabatan ini akan terus terjalin dengan baik.
10. Staf administrasi Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Peneliti Menyadari bahwa dalam tesis ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, mengingat kemampuan peneliti yang masih sangat terbatas, oleh karena itu peneliti mengharapkan saran dan kritik membangun demi perbaikan pada masa yang akan datang dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya serta bagi kita semua, Amin.

Surakarta, 07 November 2016

Peneliti,

YOEL ANDAR SIMANJUNTAK

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
ABSTRAK INDONESIA	x
ABSTRACT INGGRIS	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Teori Pidana Anak	12
a. Problem pelaksanaan Peradilan Anak	20
b. Asas-Asas Pidana Anak	22
B. Teori Kebijakan Publik	29
C. Penelitian Relevan	38
D. Kerangka Berpikir Penelitian	44
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Metode Penelitian	46
B. Jenis Penelitian	47
C. Bentuk penelitian	48
D. Sifat Penelitian	49
E. Lokasi Penelitian	49
F. Jenis Data	50
G. Sumber Data	50
a. Bahan hukum Primer	50
b. Bahan Hukum Sekunder	51
c. Bahan Hukum Tersier	51
d. Bahan Non Hukum	52
H. Metode Pengumpulan Data	53

a. Studi Kepustakaan	53
b. Wawancara	53
c. Obserasi	55
d. Dokumen	56
I. Catatan Lapangan dan Tambahan	56
J. Teknik Analisis Data	56
K. Batasan Oprasional	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Kesesuaian Sistem Peradilan Pidana Anak dengan HAM dalam Hal Pemenuhan Hak Anak	59
B. Kebijakan Kota Layak Anak dari Segi Hak Anak.....	70
C. Kebijakan Kota Layak Anak terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Hak Anak	84
D. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak	88
E. Implementasi <i>Restorative Justice</i>	93
a. Stagnasi Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i>	97
F. Implementasi <i>Diversi</i>	102
a. Keuntungan <i>Diversi</i>	105
b. Hambatan <i>Diversi</i>	106
c. Bentuk <i>Diversi</i>	111
G. Peran Lembaga Pelayanan Terpadu	112
H. Efektivitas Peranan Bapas	119
I. Evaluasi Kebijakan Pemerintah	126
a. Pendekatan Evaluasi Kebijakan	128
b. Evaluasi Partisipasi Kebijakan Pemerintah	130
c. Konsep Arah Evaluasi Kebijakan Pemerintah	133
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	139
B. Implikasi	142
a. Implikasi Teoritis	142
b. Implikasi Metodologis	143
c. Implikasi Praktis	143
C. Saran	144
DAFTAR PUSTAKA	146

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Berpikir Penelitian	45
Gambar 2. Bagan Kota Layak Anak dan Anak Berkonflik dengan Hukum	78
Gambar 3. Bagan Alur Kebijakan Pemerintah	130



ABSTRAK

Anak adalah generasi penerus bangsa. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Hal ini merupakan komitmen Indonesia dalam menghormati dan memenuhi hak anak. komitmen ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan operasionalnya pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2001 tentang Perlindungan Anak. Untuk mentransformasikan hak-hak anak ke dalam proses pembangunan, pemerintah mengembangkan kebijakan Kota Layak Anak. Menciptakan kebijakan yang ramah terhadap anak merupakan sebuah keniscayaan. Namun peningkatan permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum sungguh memprihatinkan.

Meskipun Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diterbitkan, namun belum dapat menyelesaikan permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini adalah bertujuan untuk: (1) Untuk mengevaluasi kebijakan Pemerintah Kota Surakarta tentang Kota Layak Anak Mengenai Anak Berkonflik dengan Hukum Berkaitan mengenai isu Hak Anak. (2) untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menangani Anak Berkonflik dengan Hukum menurut Undang-undang No.11 tahun 2012.

Metode penelitian yang digunakan termasuk penelitian normatif doktrinal, yang menekankan pendekatan kualitatif. Studi permasalahan kasus-kasus merupakan salah satu bentuk rancangan kualitatif yang berusaha mendeskripsikan suatu latar belakang (*setting*) atau objek tertentu secara terinci dan mendalam. Data penelitian diperoleh melalui pengamatan, wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumen dengan objek penelitian yaitu Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Kota Layak Anak. Data penelitian dianalisa dan dievaluasi dengan menggunakan model analisa *perspektif kualitatif* dan model analisa *evaluatif*. Teori evaluasi kebijakan publik melihat bahwa hubungan antara kebijakan Kota Layak Anak dengan Sistem Peradilan Pidana Anak mutlak diperlukan dalam satu kesatuan untuk melindungi hak anak, terutama hak Anak Berkonflik dengan Hukum.

Penelitian memperlihatkan hasil hubungan antara kebijakan publik Kota Layak Anak, Hak Anak dan Sistem Peradilan Pidana anak. Pada prakteknya kebijakan Kota Layak Anak masih belum memberikan harapan tentang pemenuhan hak anak. Kebijakan mengenai proses *diversi* dan *restoratif justice* mengandung banyak keuntungan yang memihak perlindungan hak anak. Oleh karena itu perlu benar-benar direalisasikan dan direspon oleh semua orang. Kebijakan Kota Layak Anak belum berjalan baik berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak. Kurangnya dukungan pemerintah kota surakarta terhadap proses *diversi* dan *restoratif justice*. Kebijakan yang diambil pemerintah masih berupa kebijakan fisik saja dan hanya show off saja.

Kata Kunci :

Evaluasi kebijakan publik, Hak Anak, Kota Layak Anak, Anak Berkonflik Hukum

ABSTRACT

Indonesia has Ratified the Convention on the Children Rights. This is Indonesia's commitment to respect and to fulfill children's rights. This commitment embodied in the Constitution and becomes operational in Law Number 23 of 2003 on Child Protection. To transform children's rights into the country's development process, the government developed a policy of Child Friendly City. Creating a child-friendly cities policy is necessary. However, the increase in the Children Conflict with the Law has made everyone concerned.

Although in Law Number 11 of 2012 on Juvenile Justice System has been published, but can not solve the problems of the children in conflict with the law. This research aims to: (1) to evaluate the Surakarta government policies of Child Friendly City relating to Children's rights. (2) to resolve the problems faced by local government in dealing with the Children Conflict with the Law under in Law Number 11 of 2012.

The research method used including doctrinal normative research, which stresses a qualitative approach. The problem of cases study is one form of draft a qualitative approach, who tried to describe the background or other object in detail and depth. Data were obtained through observation, interview, literature study, and document study with the research object is the Children Conflict with the Law and the Surakarta government policies of Child Friendly City. Data were analyzed and evaluated using a model of qualitative perspective analysis and model of evaluative analysis. Evaluation public policy theory saw that the relationship between Child Friendly Cities with Juvenile Justice System absolutely necessary in one unit to protect Children's rights, especially the right of the Children Conflict with the Law.

The study shows the results of the relationship between the Child Friendly Cities policy, Child Rights and Juvenile Justice System. In practice, the Child Friendly Cities policy is still not giving hope about the fulfillment of children's rights. Policies on the process of diversion and restorative justice contain many advantages that favor the protection of children's rights. Therefore it needs to be realized and responded by everyone. The Child Friendly Cities Policy has not gone well with regards to the criminal justice system. Lack of support from the city government of Surakarta against the process of diversion and restorative justice. The policy taken by the government is still a physical policy only and just show off only.

Key words :

Evaluation public policy, Children's rights, Child friendly cities, Children in conflict with the law.